

PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS PENDIDIKAN DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM UPAYA PENERTIBAN PELAJAR DI KOTA PEKANBARU

Rahayu Lestari

Email: Rahayulestari18@gmail.com

Dibimbing oleh : Drs. Chalid Sahuri, MS

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

Rahayu Lestari (1101111645), Coordination performing on Education Department of Pekanbaru City And Unit of Pamong Praja's Police In The Control Effsort of Student in Pekanbaru City, Led by Drs. H. Chalid Sahuri, MS.

Student's mischief at Pekanbaru City have not handled with every consideration by the side that relate. In fact, a lot of student in Elementary School (SD), Junior High School (SMP) and Senior High School (SMA) which breached the discipline of School, that Student comes out at the moment of hour's lesson still happened, there is a student that do not go to School and more choosed to play at Games Station and billiards. This phenomenon can not continually let because Student constitutes Nation Child that becomes State Asset that will drawn out State accountability to the fore it. The Student is necessarily at School while effective hour study be happen, are not on the contrary come out and play Schooled environment outboard.

In coordination theory by A.F Stooner, available factor which regard coordination performing, which is: planning, communication, division task and observation. This research intent to know coordination performing on duty Education and Unit of Pamong Praja's Police in the effort to controled the Student at Pekanbaru City.

Observational model that is utilized in this research is qualitative observational. With tech that is utilized which is *snowball is sampling*, to *key informan* research namely on duty Education Department of Pekanbaru City, Unit of Pamong Praja's Police in Pekanbaru City, headmaster, parents, then analyze and process.

Base on the research that already being done, with gets guidance on that cognitive concept performing at Pekanbaru City, did not optimally by Education Department and Unit of Pamong Praja's Police Pekanbaru City.

Key word: MOU, Coordination, Control, Student

PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan Bangsa dan mengembangkan Manusia Indonesia seutuhnya. Pada intinya Pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang dituangkan dalam Undang Undang No.20 Tahun 2003, Pasal 3 menyebutkan “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa , bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bibit Bangsa yang berguna”.

Sikap mental yang masih rentan terhadap lingkungan memberi pengaruh besar terhadap Pelajar, khususnya Pelajar yang sedang dalam masa perkembangan atau yang biasa disebut “Pubertas”yaitu proses Anak-Anak menjadi Remaja yang masih dalam proses mencari jati diri. Kerentanan ini membuat mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan teman bermain. Dampaknya adalah banyaknya kenakalan yang terjadi yang dimulai dari Pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi permasalahan saat ini.Terkait permasalahan ini, semua pihak khususnya pihak Sekolah memiliki peran penting untuk mengawasi dan mengendalikan kenakalan pelajar tersebut.

Fenomena ini tidak bisa terus dibiarkan begitu saja, karena akan merusak karakter dari masing-masing Pelajar, sehingga perlu diberi peringatan dengan cara sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi adalah untuk mengingatkan Pelajar yang sering bolos, akan ditangkap oleh Satpol

PP. Bagi mereka yang terjaring razia Penertiban jika kedapatan berada di warnet atau di tempat billiar ketika jam Sekolah masih berlangsung dan masih menggunakan seragam Sekolah akan ditangkap dan dilaporkan kepihak Sekolah dan Orang Tua.

Berikut jadwal apel bersama seiring sosialisasi yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan bersama Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel II.3
Jadwal Apel Bersama Dinas Pendidikan Pekanbaru Bersama Polisi Pamong Praja Tahap II Kota Pekanbaru Tahun 2013

No	Nama Sekolah	Alamat	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	SMKN 4	Jl. Purwodadi	02-09-2013	Pemimpin Satpol PP
2	SMK KANSAI	Jl. Damai ujung panam	04-09-2013	Pemimpin Satpol PP
3	SMA AL HUDA	Jl. Subrantas	06-09-2013	Pemimpin Satpol PP
4	SMAN 4	Jl. Adi sucipto	09-09-2013	Pemimpin Satpol PP
5	SMK TARUNA	Jl. Raja wali panam	11-09-2013	Pemimpin Satpol PP
6	SMA TRIBAKTI	Jl. Arengka	13-09-2013	Pemimpin Satpol PP
7	SMKN 2	Jl. Pattimura	16-09-2013	Pemimpin Satpol PP
8	SMA MM	Jl. KH. Ahmad dahlan	18-09-2013	Pemimpin Satpol PP
9	SMA TARUNA	Jl. Melur gg lili	20-09-2013	Pemimpin Satpol PP
10	SMAN 10	Jl. Bukit barisan	23-09-2013	Pemimpin Satpol PP

(Sumber : Kantor Dinas Satpol PP)

Selain diberi pembinaan, Siswa yang terjaring juga diminta untuk menandatangani surat perjanjian agar tidak mengulangi kembali. Bentuk surat perjanjiannya berupa surat perjanjian formal yang diberikan oleh Kasi PPNS. Setelah selesai, diberi pembinaan, Orang Tua di izinkan untuk membawa Anak masing-masing, dengan syarat membawa Kartu Keluarga sebagai

syarat bahwa Wali yang datang menjemput adalah benar-benar Orang Tua Pelajar yang tertangkap. Tujuan Dibuatnya kesepakatan antara Dinas Pendidikan dan Satpol PP ini didasari oleh tidak tertibnya Siswa-Siswi Pelajar yang bolos atau keluar Sekolah pada saat jam pelajaran masih berlangsung dan Pelajar tersebut banyak terlihat bermain di warnet, tempat billiar, atau taman kota dan masih mengenakan pakaian Sekolah. Didasari hal tersebut, maka Pemerintah Kota Pekanbaru membuat MOU yang disepakati oleh dua instansi terkait. Tujuannya adalah agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran siswa siswi tersebut yang sudah menjadi keresahan pihak Sekolah dan Orang Tua.

Bentuk dari pelaksanaan tugas yang telah dilakukan, terdapat banyak Pelajar yang terjaring razia penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan dilakukannya penertiban ini adalah untuk ketertiban umum dimana banyak Pelajar yang berkeliaran diluar lingkungan Sekolah dan bermain diwarnet dan biliar. Dengan adanya penangkapan akan memberikan efek jera untuk tidak mengulanginya lagi.

Untuk menjalankan tugas ini, diperlukan koordinasi, baik untuk perencanaan maupun dalam pelaksanaannya guna tercapainya hasil yang maksimal. Terkait hal ini, Dinas Pendidikan bertindak sebagai koordinator dan berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengkoordinir para Siswa yang tidak disiplin dalam belajar di Sekolah, bentuk konkrit dari tujuan koordinasi ini adalah untuk menertibkan Pelajar yang bolos tersebut dengan melakukan razia kelokasi-lokasi yang sudah di sepakati sebelumnya. Maka, Koordinasi ini perlu dilaksanakan mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan sampai pada pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan gejala atau fenomena diatas maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “

Pelaksanaan Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam upaya Penertiban Pelajar di Kota Pekanbaru “

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang ditemui di lapangan yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pelajar di Kota Pekanbaru?
- 2) Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Koordinasi Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pelajar di Kota Pekanbaru?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh Penulis sesuai dengan tujuan penelitiannya yakni :

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi penertiban disiplin Pelajar oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam penertiban disiplin Pelajar oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja di kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a) Manfaat Teoritis, yaitu sebagai bahan pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik dibidang koordinasi.
 - b) Manfaat Praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan bahan

informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian dengan masalah yang sama.

KONSEP TEORI

1. Manajemen

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi diperlukan sebuah manajemen yang baik. Menurut Haiman dalam (Manullang, 2008:3). Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam (Marnis, 2008:3), manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber –sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja , yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Brantas, 2009:4)

2. Koordinasi

Menurut Leonardo D white dalam Sutarto (2002:141), koordinasi adalah penyesuaian diri dari bagian-bagian atau unit-unit yang satu dengan yang lainnya dan gerakan serta pengerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan. Selanjutnya menurut James D.Mooney, koordinasi adalah pengaturan sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama.

Menurut Sondang P. Siagian (1985:110) koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapai bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun

menjadi suatu kebulatan terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Dalam Sutarto (1993:152) Koordinasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mengadakan pertemuan antar koordinasi antar pejabat.
- 2) Mengadakan pertemuan formal antar pejabat yang disebut rapat.
- 3) Membuat edaran berantai kepada pejabat yang diperlukan
- 4) Menyebarkan kartu nama pejabat yang memerlukan
- 5) Mengangkat *coordinator*
- 6) Membuat buku pedoman organisasi , pedoman tata kerja dan kumpulan peraturan.
- 7) Berhubungan melalui alat perhubungan
- 8) Membuat tanda,symbol, kode dan lain-lain

3. Pembinaan

Menurut Widjaya (1997:29) pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan , memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usahaperbaikan, penyempurnaan , pengembangan , pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Widjaya menambahkan bahwa dalam definisi tersebut secara implicit mengandung suatu interpretasi bahwa pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan , pengembangan, pembiayaan, koordinasi , pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

4. Disiplin

Menurut singodimejo dalam Edy Sutrisno (2010) adalah, sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma pertauran yang berlaku disekitarnya. Disiplin yang baik

akan mempercepat tujuan organisasi sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Menurut moenir **dalam Edy Sutrisno (2010)** “untuk mencapai sebuah tujuan, diperlukan adanya disiplinasi, yaitu suatu kesadaran untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, melalui suatu sistem peraturan yang tepat”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan **Sugiyono (2007:11)**. Penelitian ini memusatkan pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual. Maka pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan menggambarkan suatu kejadian atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang sedang terjadi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di kota Pekanbaru, karena berdasarkan fenomena yang ada menjadi bukti kuat bagi Peneliti untuk mengungkap masalah tersebut. Selain itu, melalui data dan hasil observasi juga menjadi alasan Peneliti untuk mengambil lokasi di Kota Pekanbaru. Subjek penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian

Analisa data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dari instansi terkait dan sumber-sumber lain, kemudian data-data tersebut dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dijabarkan secara deskriptif atau dijabarkan sesuai dengan kenyataan Koordinasi Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban Pelajar di Kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan koordinasi Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya Penertiban Pelajar di Kota Pekanbaru.

A. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Upaya Penertiban Kota Pelajar Kota Pekanbaru

Koordinasi berkaitan dengan penyerasian serta penyatuan tindakan dari sekelompok Orang. Adapun koordinasi yang baik hendaklah memuat hal-hal yang sebagai berikut :

- a. Adanya perencanaan yaitu menyangkut proses persiapan dan pelaksanaan secara sistematis dari pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Adanya hubungan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan.
- c. Adanya pertemuan melalui rapat-rapat

Untuk membahas masing-masing indikator dari variabel koordinasi penertiban Pelajar di Kota Pekanbaru , Penulis menggunakan wawancara yang dilakukan langsung kepada informan.

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai indikator melakukan hubungan komunikasi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah keputusan yang akan dikerjakan waktu yang akan datang. Perencanaan dimaksudkan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang akan dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai indikator melakukan

membuat perencanaan, maka dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

a. Adanya tujuan rencana kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan antara dua pihak, belum ada perencanaan yang dibuat secara terstruktur, kedua pihak tersebut hanya menjalankan apa yang sudah dijelaskan saat rapat-rapat awal dibuatnya MOU. Seharusnya tim pelaksana penertiban membuat perencanaan yang jelas, yang bisa nantinya digunakan untuk periode jangka panjang. Dari perencanaan tersebut, akan terlihat hal apa saja yang sudah ditetapkan dan akan dicapai. Perencanaan juga berguna sebagai standar para tim dalam melakukan kegiatan, sehingga ada pedoman yang dipegang, dan apabila terjadi penyimpangan atau keluar dari rencana, bisa diluruskan kembali dengan berpegang pada standar tersebut.

b. Adanya penetapan sasaran rencana kerja

Dari wawancara yang dilakukan bahwa Dinas Pendidikan dan Satpol PP tidak memiliki target secara tertulis. Targetnya hanya diketahui sebatas menjalankan tugas oleh masing-masing tim pelaksana penertiban, yaitu menertibkan pelajar yang bolos kewarnet pada saat jam belajar. Pelaksanaan koordinasi yang dijalankan seharusnya memiliki perencanaan dimana perencanaan tersebut memiliki manfaat sebagai standar dari kegiatan yang akan dilakukan

2. Komunikasi

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian. Sehingga informasi dapat dipahami oleh pihak kedua pihak, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik. Sebagai suatu proses penyampaian informasi, individu yang terlibat dalam kegiatan

komunikasi khususnya komunikator perlu merancang dan menyajikan informasi yang benar dan tepat sesuai *setting* informasi, lalu informasi tersebut disajikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan tingkat penerima lawan komunikasi.

a. Kejelasan tujuan informasi yang diberikan

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa kejelasan tujuan yang disampaikan terkait penertiban Fakta ini menjelaskan bahwa tim penertiban pelajar yang bolos Sekolah sudah saling menjalankan tugas masing-masing tim. Komunikasi yang dilakukan tujuannya untuk saling berbagi informasi mengenai tujuan dari melaksanakan penertiban. Dalam proses komunikasi yang dilakukan pihak Satpol PP dan Disdik saling berkoordinasi dengan berbagi informasi terkait jadwal dan tempat dilaksanakannya penertiban, selanjutnya informasi yang disampaikan dari Satpol PP ke Disdik, akan dilanjutkan ke pihak Sekolah masing-masing Pelajar yang tertangkap. Namun, ada terdapat sedikit perbedaan pada tanggapan pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang menyerahkan tanggung jawab penyampaian informasi selebihnya ke Satpol PP, pihak Dinas Pendidikan hanya menerima informasi yang berawal dari Satpol PP. Akibatnya penyampaian informasi belum Optimal karena berat sebelah.

b. Komunikasi yang bersifat umpan balik

Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa komunikasi yang bersifat umpan balik antara sesama tim koordinator dan yang dikoordinir belum jelas . terdapat tumpang tindih atau saling melempar tanggung jawab diantara pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Satpol PP. Pelaksanaan komunikasi memang sudah dijalankan, tetapi belum optimal, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Dinas

Pendidikan terkesan hanya menerima laporan saja, tanpa adanya hubungan timbal balik komunikasi yang jelas. Pelaksana dalam upaya penertiban pelajar ini, memang melakukan tugas dengan memberikan informasi komunikasi bersifat timbal balik berdasarkan tanggung jawab masing-masing pelaksana. Namun Komunikasi yang disampaikan hanya sekedar penyampaian sebatas telpon. Dan kemudian berkumpul di kantor Satpol PP ketika para Pelajar sudah terjaring razia.

Pembagian informasi yang dilakukan dimaksudkan agar tim pelaksana penertiban mengetahui waktu dan juga lokasi yang akan dirazia. Selain itu, informasi yang didapatkan tidak hanya berasal dari perintah Dinas Pendidikan, tetapi juga berasal dari aduan warga masyarakat yang merasa anak mereka tidak mengikuti pelajaran disekolah. Disamping itu, pembagian informasi menggunakan alat komunikasi seperti *handphone* juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dan Satpol PP didalam proses komunikasi . Namun intensitas komunikasi yang dilakukan secara hanya beberapa kali terhitung sejak MOU dibuat, sehingga masih ada beberapa hal yang belum dijelaskan dalam penyampaian informasi mengenai perencanaan dan target-target yang ingin dicapai. Kondisi ini yang membuat penyampaian informasi kurang maksimal karena tidak dilakukan pertemuan langsung melainkan hanya melalui *handphone*. Sebaiknya pihak koordinator dan yang dikoordinir melakukan pertemuan, karena penyampaian komunikasi secara langsung bisa lebih memudahkan para anggota dalam menyampaikan ide-ide dan saran dalam pembuatan rencana dan target kegiatan.

c. Sarana dan prasarana

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk sarana dan prasarana yang mendukung dalam melakukan komunikasi sudah tersedia dengan baik, seperti telepon, dan kendaraan operasional. Serta sarana dan

prasarana individu yang dimiliki masing-masing anggota organisasi untuk berkomunikasi seperti *handphone*. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan penertiban ini, tidak ada pemberian dana insentif kepada anggota tim pelaksana razia, hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat kegiatan Penertiban belum optimal, seharusnya dengan adanya dana insentif bisa menjadi motivasi untuk anggota sehingga semakin semangat dalam bekerja. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penertiban Pelajar bolos memang sangat diperlukan karena sarana dan prasarana tersebut sangat membantu terlaksananya kegiatan penertiban seperti mobil yang berfungsi kendaraan operasional untuk membawa Anggota Tim Pelaksana penertiban menuju lokasi razia. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang tersedia tersebut harus dimaksimal dari segi jumlah dan ketersediaan kendaraan operasional yang bisa digunakan. Supaya proses pelaksanaan penertiban pelajar bolos Sekolah di Pekanbaru tersebut dapat berjalan dengan optimal. Tujuannya semakin efektif pelaksanaan razia, maka semakin berkurangnya Pelajar yang bolos kewarnet karena sudah dilakukannya razia penertiban dan pembinaan agar tidak terulang kembali.

3. Pembagian kerja

Pembagian tugas timbul dikarenakan seseorang untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh karena itu pembagian tugas berarti pengkhususan yang dipertimbangkan antara lain : perincian tugas, pengadaan dan penempatan pegawai, kewajiban dan tanggung jawab agar terdapat efisiensi dalam menggunakan tenaga atau antara instansi –instansi yang terkait dengan saling bekerja sama.

a. Adanya pedoman mengenai rincian dan uraian tugas

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masing-masing pihak sebenarnya sudah mengetahui dan menjalankan tugas mereka masing-masing. Acuan dalam pelaksanaan penertiban ini sudah disepakati saat awal-awal setelah MOU dibuat. Pihak Dinas Pendidikan dan Satpol PP hanya tinggal menjalani saja. Perincian dan pembagian tugas bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan saling berebut tugas|. Rincian tugas yang dilakukan juga bertujuan untuk menciptakan dinergitas dalam pelaksanaan penertiban yang akan dilakukan. Kemampuan merincikan tugas juga harus disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja yang tergabung didalam tim implementor penertiban pelajar ini. Sehingga dengan spesifikasi tugas yang sesuai dengan keahlian akan menciptakan pelaksanaan tugas yang baik dan meminimalisir kesalahan.

b. Adanya penempatan pegawai sesuai bidang masing-masing

Dari hasil wawancara terlihat bahwa sudah ada pembagian tugas yang dilakukan, khususnya yaitu pembagian tugas pada Satpol PP sebagai tim eksekusi atau pelaksana razia penertiban. Dalam tiap kali razia, diturunkan sekitar 2-3 anggota pleton, dimana tiap pleton memiliki 20 anggota. Selain bertugas untuk merazia/menangkap pelajar yang bolos kesekolah, anggota Satpol PP yang ditugaskan juga bertugas mendata administrasi dan memberi pembinaan kepada Pelajar yang tertangkap. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk melaporkan ke pihak Sekolah asal Pelajar yang tertangkap razia. Fakta ini menunjukkan bahwa setiap anggota penertiban yang dipilih memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka. Hal ini tentunya akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada masing-masing pihak. Sebab keberhasilan pelaksanaan tugas dari para tim penertiban

akan ditentukan dari pendelegasian tugas yang tepat dan tingginya rasa tanggung jawab kerja yang ditunjukkan oleh tim tersebut.

c. Adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas

Dari hasil wawancara dan MOU diketahui, bahwa koordinator dalam pelaksanaan penertiban ini adalah Dinas Pendidikan Dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tim pelaksana penertiban. Mekanisme pelaksanaan penertiban pelajar yang berkeliaran diluar sekolah sewaktu jam belajar berlangsung, diatur oleh Bidang Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru Dinas Pendidikan. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan dalam pelaksanaan penertiban pelajar di Kota Pekanbaru sudah diketahui masing-masing pihak. Yakni, Dinas Pendidikan bertanggung jawab sebagai koordinator dan berkoordinasi dengan Satpol PP, dimana tugas Dinas Pendidikan adalah melakukan hubungan koordinasi dengan Satpol PP dalam bentuk pengambilan keputusan untuk melakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan pelaksana penertiban pelajar tersebut. Dari wawancara yang dilakukan, dan informasi yang didapatkan dari dua pihak, Dinas Pendidikan dan Satpol PP sudah melaksanakan tanggung jawab mereka dengan optimal. Fakta ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan penertiban dengan lancar dan setiap anggota penertiban yang dipilih sudah menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada mereka. Hal ini nantinya tentu akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas mereka, yakni menertibkan pelajar yang sering bolos ke warnet pada saat jam Sekolah masih berlangsung. Keberhasilan pelaksanaan tugas dari para tim penertiban akan ditentukan dari pendelegasian tugas yang tepat dan tingginya rasa tanggung jawab kerja yang ditunjukkan oleh tim tersebut. Untuk itu dalam meningkatkan

tanggung jawab kerja yang tinggi, penanggung jawab tim implementor penertiban memberikan otonomi kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada masing-masing pihak.

4. Pengawasan

Pengawasan berarti suatu proses menetapkan apa yang harus dikerjakan agar sesuai dengan apa yang di rencanakan. Tujuannya Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan kelemahan yang dihadapi , dan berusaha untuk melakukan tindakan perbaikan. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan dan kegiatan organisasi tercapai. Realitasnya langkah awal proses pengawasan adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

a. Pengawasan terhadap hasil laporan kegiatan

Dari hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa belum ada pengawasan terhadap hasil dari laporan-laporan kegiatan pada pelaksanaan koordinasi dalam upaya penertiban pelajar sekolah di kota Pekanbaru. Padahal Pengawasan terhadap hasil laporan ini mengacu pada penetapan standar antara pelaksanaan yang sudah dilakukan dan laporan pelaksanaan yang sudah dilaporkan. Indikator nya bisa dilihat dari berapa kali pelaksanaan dilakukan, bentuk pelaksanaannya, bagaimana laporannya apakah tertulis atau hanya via telephone, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, belum ada pengawasan secara jelas dan terstruktur terhadap laporan hasil kegiatan razia yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pihak Dinas Pendidikan hanya menerima hasil laporan tersebut tanpa memeriksa akuratan data yang telah dilaporkan oleh pihak Satpol PP. Dan laporan tersebut disampaikan dalam bentuk tulisan dan laporan langsung via telepon dari Satpol PP ke Dinas Pendidikan. Waktu

penyampaian laporan juga tidak terjadwal hanya diberikan setiap kegiatan razia dilakukan. Seharusnya penyampaian laporan memiliki jadwal tertentu yang sudah disepakati misalnya setiap bulan, atau setiap 6 bulan sekali. Disini bisa dilihat bahwa belum ada pengawasan yang dilakukan secara efektif terhadap laporan kegiatan razia penertiban pelajar sekolah di Kota Pekanbaru

b. Pengawasan langsung dilapangan oleh atasan terhadap kegiatan yang dilakukan.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pengawasan secara langsung belum dilakukan dengan tepat dan jelas. Berdasarkan salah satu tanggapan informan, pengawasan secara langsung belum ada dilakukan, dan pihak lainnya mengatakan bahwa pengawasan biasanya dilakukan oleh masing-masing pimpinan saja, atau koordinator yang memang ditunjuk saat sedang melakukan kegiatan. pada kegiatan razia penertiban ini, diperlukan pengawasan langsung untuk memastikan bahwa hal-hal yang akan dilakukan sebelum kegiatan, sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang ingin dicapai. Pengawasan ini seharusnya dilakukan oleh pimpinan atau koordinator dimana pihak tersebut terjun langsung ke lapangan (observasi) untuk mengamati, melihat dan menilai kegiatan pelaksanaan penertiban pelajar sekolah tersebut apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tujuan yang ingin dicapai.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Koordinasi Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelajar di Kota Pekanbaru?

1. Penetapan Jadwal penertiban

Dalam pelaksanaan koordinasi diantara Diantara Dinas Pendidikan Dan Satuan Polisi Pamong Praja, tentunya kedua instansi ini harus memiliki jadwal dalam pelaksanaan penertiban pelajar. Dikarenakan pelaksanaan koordinasi ini

tidak dilakukan oleh 1 instansi saja, sehingga perlu penetapan jadwal penertiban yang ditetapkan dan diajukan acuan dalam melaksanakan penertiban. kenyataannya belum ada penetapan jadwal yang dilakukan, padahal Penetapan jadwal berfungsi agar pelaksanaan penertiban bisa berjalan dengan teratur dan maksimal. Selain itu, adanya mutasi jabatan pada beberapa bulan yang lalu semakin membuat pekerjaan tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan perpindahan jabatan sehingga para pelaksana yang telah ditunjuk berdasarkan jabatan menjadi lepas tangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa penetapan jadwal penertiban Pelajar di Kota Pekanbaru dalam proses pelaksanaan penertiban perlu dilakukan. Karena dengan adanya penetapan jadwal akan membuat proses penertiban terjadwal secara teratur. Karena kegiatan penetapan jadwal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan penertiban pelajar sekolah di kota pekanbaru, namun karena adanya perpindahan jabatan/mutasi jabatan ini, pelaksanaan penertiban belum ada dilakukan sejak 6 bulan yang lalu, yaitu bulan April.

Faktor ini menjadi salah satu penetapan jadwal penertiban tidak jelas. Informan mengatakan Pelantikan dan mutasi jabatan menjadi salah satu alasan kesibukan masing-masing pihak, adanya kegiatan penertiban lainnya dan beban kerja yang banyak juga menjadi alasan pihak terkait. Penertiban yang dilakukan secara gencar hanya di awal-awal keluarnya kesepakatan (MOU). Seharusnya pelaksanaan razia tetap dilakukan dengan memiliki jadwal yang sudah ditentukan, walaupun adanya kegiatan lain, tanggung jawab yang diberikan harus tetap dilaksanakan secara beriringan. Dengan adanya upaya penetapan jadwal yang dilakukan akan memberikan kejelasan dan keteraturan pelaksanaan penertiban sehingga pelaksanaan akan lebih efektif.

2. Dana insentif

Setiap organisasi selalu menginginkan hasil yang maksimum dalam proses kegiatannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya dukungan dari setiap unsur organisasi, termasuk anggota pelaksana kegiatan. dalam usaha pencapaian tujuan juga ditandai dengan adanya dukungan yang kuat dari keuangan dan tunjangan. Organisasi akan memberikan suatu penghargaan atau insentif bagi anggota yang berprestasi baik dan hal ini akan membuat anggota bekerja sebaik mungkin. Insentif berfungsi sebagai sarana motivasi yang dapat diberikan batasan perangsang ataupun pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada anggota agar dalam diri mereka tumbuh semangat yang lebih besar dalam bekerja. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dana insentif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dalam penertiban Pelajar Sekolah di Kota Pekanbaru. Dana insentif merupakan faktor penting sebagai pendukung pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh tim anggota. Oleh karenanya ketersediaan dana insentif yang mendukung dalam pelaksanaan penertiban Pelajar Sekolah di Kota Pekanbaru akan sangat menentukan kinerja dan pelaksanaan proses penertiban. Untuk itu perlu dilakukan komitmen Perencanaan anggaran insentif untuk masing-masing anggota dalam pelaksanaan penertiban Pelajar Sekolah di Kota Pekanbaru. Tujuannya supaya pekerjaan menjadi semakin optimal karena insentif yang sudah dianggarkan sebelumnya. Pemberian insentif dari pimpinan agar anggota pelaksana semakin giat lagi melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan proses penertiban.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka Penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi penertiban Pelajar di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal. Salah satu pelaksanaan koordinasi yang belum berjalan optimal adalah tidak adanya kegiatan pertemuan atau rapat yang dilakukan untuk membahas perencanaan, strategi dan target yang ingin di capai sebelum melaksanakan kegiatan dan turun lapangan dalam proses pelaksanaan penertiban Pelajar Sekolah di Kota Pekanbaru. Karena dalam koordinasi yang dilakukan pertemuan tersebut hanya sekali dilakukan, bahkan tidak memiliki jadwal tetap, baik dalam pelaksanaan rapat maupun pelaksanaan penertiban. Padahal dengan adanya pertemuan yang intensif dalam membahas perencanaan sebelum turun lapangan akan membuat pelaksanaan penertiban semakin maksimal, karena pada saat pertemuan secara langsung penyampaian komunikasi menjadi lebih jelas dibandingkan melalui telepon. Dengan tidak terjadwalnya pertemuan dan tidak adanya perencanaan maka penyampaian komunikasi dan informasi baik dari segi saran dan keluhan terhadap kegiatan tidak akan diketahui, padahal dengan adanya hubungan komunikasi yang baik, pelaksanaan penertiban akan berjalan lancar karena terdapat *feedback* diantara dua pihak yang saling berkoordinasi.

dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa koordinasi belum berjalan dengan baik.

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam upaya penertiban Pelajar Sekolah di Kota Pekanbaru adalah penetapan jadwal

penertiban dan dana insentif bagi anggota.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan koordinasi penertiban Pelajar Sekolah di Kota Pekanbaru Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya tim penertiban yang berasal dari dua instansi, yaitu Dinas Pendidikan Dan Satuan Polisi Pamong Praja lebih memantapkan koordinasi yang telah terjalin dengan melakukan rapat dan pertemuan untuk melaksanakan pembahasan bersama dalam proses penertiban akan dilaksanakan. Sehingga dengan adanya rapat koordinasi yang dilakukan dapat dilaksanakan pula evaluasi dan pengawasan terhadap hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan tersebut, nantinya akan didapati hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban Pelajar Sekolah yang dilakukan di Kota Pekanbaru. Selain itu pihak Dinas Pendidikan harus membuat jadwal rapat secara periodik atau berkala, membuat pertemuan dengan semua pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan, Satpol PP, pihak Sekolah dan Orang Tua untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi.
2. Hendaknya setiap tim pelaksana kegiatan penertiban yang sudah terpilih melaksanakan tugasnya lebih giat lagi dalam usaha penertiban Pelajar Sekolah di Kota Pekanbaru, pembinaan dan sanksi yang diberikan kepada Pelajar yang masih tertangkap razia harus lebih tegas agar Pelajar tidak berani untuk mengulang kesalahan itu lagi. Selain itu, dengan adanya mutasi jabatan seharusnya tidak mengganggu kegiatan dan tanggung jawab masing-masing pelaksana. Tetapi mutasi jabatan beberapa waktu lalu membuat tim

pelaksana seakan lepas tangan dan tidak melanjutkan tanggung jawabnya.

Selanjutnya, hendaknya ada perencanaan anggaran pemberian uang insentif untuk para tim anggota pelaksana kegiatan penertiban karena dengan adanya uang insentif akan semakin memotivasi para anggota pelaksana penertiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Buku:

- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Handoko, Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta :BPFE
- , 2003. *Manajemen*, edisi 2. Yogyakarta: BPFE
- Handayani, S. 2001. *Pengantar suatu ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta : Gunung Agung
- Hamim, Sufian. 2005. *Administrasi, organisasi dan manajemen*. Pekanbaru : Multi Grafindo
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Kencana, Inu S. 2001. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta : PT.Grasindo
- Koonz, Harold dan Cyillo'Donnel. 1989. *Manajemen*, Jakarta :Erlangga
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant, 2012. *Public policy*. Jakarta : Gramedia
- Manullang, M. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: UGM Press
- Marnis. 2008. *PengantarManajemen*. Pekanbaru :UnriPress
- , 2010. *PengantarManajemen*.Pekanbaru: UnriPress
- Moekijat . 1994. *Koordinasi suatu tinjauan teoritis,CV*. Mandar Maju: Bandung
- Sarwono, sarlito wirawan, 2001. *Pengantar psikologi sosial*. Jakarta : Rineka Cipta
- Syamsi S.U, Idnu. *Pokok-pokok organisasi dan manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta
- Siagian, Sondang P. 2004. *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sutarto, 2006. *Dasar-dasar organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Karya ilmiah :
- Ervani Zulia. 2013. Koordinasi pelaksanaan penertiban pedagang dan parkir diatas jembatan barelang kota Batam, Pekanbaru : Universitas Riau
- Ditasman, 2013. Pelaksanaan koordinasi penertiban gelandangan pengemis (gepeng) oleh Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja di kota Pekanbaru tahun 2011, Pekanbaru : Universitas Riau